

Libelarisme dan Sosialisme sebagai Perjuangan Moral (Studi Kasus pada Bappeda Kota Gorontalo)

Tineke Wolok^{a*}, Cindy Aniga^b, Gufran K. Hidu^c, Priscilia Mokodongan^d,
Sri Milanda Polapa^e, Jepri E. Madif^f

a,b,c,d,e,f Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo,
email: tinekewolok@ung.ac.id *

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 April 2026

Revised : 10 Mei 2026

Accepted : 17 Mei 2026

Keywords:

Liberalism, Socialism, Morals,
Public Policy, Regional
Development

Kata Kunci:

Liberalisme, Sosialisme, Moral,
Kebijakan Publik, Pembangunan
Daerah

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Liberalism and socialism are two major ideologies with fundamental differences in their views on the relationship between individuals, society, and the state. However, both share a moral dimension oriented toward achieving a just and dignified life. This study aims to analyze liberalism and socialism as forms of moral struggle and their implementation in public policy at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in Gorontalo City. The method used is a qualitative approach with literature review and conceptual analysis. The results of the study indicate that liberalism emphasizes individual freedom as the primary moral value, while socialism emphasizes social justice and collective solidarity. In practice, BAPPEDA in Gorontalo City integrates these two values in participatory and equitable development planning.

ABSTRAK

Liberalisme dan sosialisme merupakan dua ideologi besar yang memiliki perbedaan mendasar dalam memandang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Namun demikian, keduanya memiliki dimensi moral yang sama-sama berorientasi pada pencapaian kehidupan yang adil dan bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis liberalisme dan sosialisme sebagai bentuk perjuangan moral serta implementasinya dalam kebijakan publik di BAPPEDA Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai nilai moral utama, sedangkan sosialisme menitikberatkan pada keadilan sosial dan solidaritas kolektif. Dalam praktiknya, BAPPEDA Kota Gorontalo mengintegrasikan kedua nilai tersebut dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

LATAR BELAKANG

Liberalisme dan sosialisme merupakan dua ideologi besar yang terus menjadi perdebatan dalam diskursus politik dan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik di negara berkembang. Dalam perkembangan terbaru, kedua ideologi ini tidak lagi dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai kerangka nilai yang dapat saling melengkapi dalam menjawab tantangan global seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan politik modern cenderung mengarah pada pendekatan hibrid yang menggabungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial sebagai dasar pembangunan yang inklusif (Agustina, 2024; Hariyadi, 2021).

Dalam perspektif liberalisme, kebebasan individu tetap menjadi nilai moral utama yang harus dijamin dalam setiap sistem sosial. Literatur terbaru menegaskan bahwa liberalisme tidak hanya berkaitan dengan kebebasan politik, tetapi juga mencakup kebebasan ekonomi dan partisipasi dalam proses pembangunan. Kebebasan individu dipandang sebagai prasyarat bagi terciptanya kesejahteraan, karena individu yang bebas akan mampu berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan (Harahap, 2025). Dalam konteks ini, gagasan klasik dari John Locke tetap relevan, meskipun telah mengalami reinterpretasi dalam konteks globalisasi dan pembangunan kontemporer.

Di sisi lain, sosialisme kembali mendapatkan perhatian dalam kajian-kajian terbaru sebagai respons terhadap meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosialisme, seperti solidaritas, pemerataan, dan keadilan sosial, menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan. Sosialisme tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sistem ekonomi tertutup, tetapi sebagai kerangka etis yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya secara adil (Triwikrama, 2025). Dalam hal ini, pemikiran Karl Marx tetap menjadi referensi utama, terutama dalam kritik terhadap ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi modern.

Perkembangan terbaru dalam kajian filsafat politik juga menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai liberalisme dan sosialisme dalam satu kerangka yang lebih komprehensif. Studi mutakhir menegaskan bahwa keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial merupakan kunci dalam menciptakan sistem sosial yang berkelanjutan. Pendekatan integratif ini menekankan bahwa kebebasan tanpa keadilan akan menghasilkan ketimpangan, sementara keadilan tanpa kebebasan akan menghambat kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, sintesis kedua ideologi ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan modern (Mukhtar & Aprison, 2025).

Dalam konteks Indonesia, dinamika antara liberalisme dan sosialisme dapat dilihat dalam praktik kebijakan pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam pembangunan nasional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh

berbagai faktor, termasuk ideologi politik, konfigurasi kekuasaan, dan paradigma ekonomi yang berkembang, sehingga menghasilkan pendekatan yang bersifat multidimensional dan adaptif (Hariyadi, 2021).

Dalam praktik pemerintahan daerah, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), integrasi nilai-nilai liberalisme dan sosialisme menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas pembangunan lokal. BAPPEDA memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. Tantangan pembangunan daerah, seperti ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan sumber daya, menuntut adanya pendekatan yang mampu mengakomodasi kebebasan individu sekaligus menjamin kesejahteraan kolektif (Maghfiroh, 2025).

Studi kasus pada BAPPEDA Kota Gorontalo menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai liberalisme dan sosialisme diimplementasikan dalam praktik kebijakan pembangunan daerah. Kota Gorontalo sebagai daerah berkembang menghadapi berbagai tantangan struktural yang membutuhkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi moral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral serta bagaimana kedua nilai tersebut diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di BAPPEDA Kota Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan filsafat politik yang kontekstual dengan realitas pembangunan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai konsep liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral, serta relevansinya dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah. Dengan memahami kerangka teoritis yang ada, analisis terhadap praktik kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gorontalo dapat dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif.

Liberalisme merupakan ideologi yang berakar pada penghargaan terhadap kebebasan individu sebagai nilai moral utama. Pemikiran John Locke menjadi fondasi penting dalam liberalisme klasik, di mana ia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah yang tidak dapat diganggu gugat, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai kerangka etika yang menempatkan individu sebagai pusat dari kehidupan sosial. Amartya Sen memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa kebebasan bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang sejati adalah proses perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (Sen, 1999).

Di sisi lain, sosialisme hadir sebagai kritik terhadap ketimpangan yang muncul akibat praktik liberalisme ekonomi yang tidak terkendali. Karl Marx mengemukakan bahwa sistem kapitalisme cenderung menciptakan relasi produksi yang eksploitatif, di mana kelas pekerja dirugikan oleh

kepemilikan modal yang terkonsentrasi pada segelintir orang. Oleh karena itu, sosialisme menekankan pentingnya kepemilikan kolektif dan distribusi sumber daya yang adil sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam perspektif ini, keadilan sosial dan solidaritas menjadi nilai utama yang harus diwujudkan dalam sistem sosial dan ekonomi (Marx, 1867).

Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai liberalisme dan sosialisme dapat ditemukan dalam pemikiran John Rawls melalui teorinya tentang keadilan sebagai fairness. Rawls berpendapat bahwa kebebasan individu harus tetap dijamin, namun ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Teori ini memberikan dasar normatif bagi penggabungan antara prinsip kebebasan dan keadilan dalam suatu sistem sosial yang berkeadilan (Rawls, 1971). Dengan demikian, pemikiran Rawls menjadi jembatan konseptual antara liberalisme dan sosialisme dalam konteks moral dan kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai liberalisme dan sosialisme tercermin dalam ideologi Pancasila, khususnya pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak secara eksplisit menganut salah satu ideologi tersebut, tetapi menggabungkan nilai kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir Indonesia seperti Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam pembangunan ekonomi nasional (Siswanto, 2004).

Dalam bidang kebijakan publik, khususnya perencanaan pembangunan daerah, konsep liberalisme dan sosialisme dapat dilihat sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan liberalisme mendorong efisiensi, inovasi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan pendekatan sosialisme menekankan pemerataan, perlindungan sosial, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Studi oleh Mukhtar dan Aprison (2023) menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang efektif adalah paradigma yang mampu mengintegrasikan kedua nilai tersebut dalam praktik kebijakan.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa liberalisme dan sosialisme tidak hanya merupakan ideologi yang bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks kebijakan publik. Keduanya dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan moral yang saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kedua nilai ini dalam konteks BAPPEDA Kota Gorontalo menjadi penting untuk memahami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam praktik pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral serta implementasinya dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, nilai, dan konsep yang bersifat abstrak, khususnya dalam konteks filsafat politik dan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali keterkaitan antara teori dan praktik secara lebih

komprehensif dan kontekstual (Creswell, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan liberalisme, sosialisme, dan perencanaan pembangunan daerah. Studi literatur ini dilakukan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat sekaligus mengidentifikasi perkembangan terbaru dalam kajian liberalisme dan sosialisme dalam konteks pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual analysis) untuk menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam kedua ideologi tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang relevan dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai liberalisme dan sosialisme diimplementasikan dalam kebijakan publik, khususnya di BAPPEDA Kota Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dimensi empiris yang didasarkan pada analisis dokumen kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan evaluasi terhadap sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir, terutama yang berasal dari lima tahun terakhir. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep liberalisme, konsep sosialisme, nilai moral, serta implementasi kebijakan publik dalam pembangunan daerah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara induktif, di mana peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikaitkan dengan kerangka teoritis yang telah dibangun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana liberalisme dan sosialisme dapat dipahami sebagai perjuangan moral dalam konteks kebijakan publik.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur dan dokumen yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi dari jurnal dan buku yang telah teruji secara akademik untuk memperkuat keabsahan analisis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara liberalisme dan sosialisme sebagai nilai moral serta relevansinya dalam praktik kebijakan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di BAPPEDA Kota Gorontalo. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik di bidang filsafat politik dan kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan realitas

pembangunan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa liberalisme dan sosialisme sebagai dua ideologi utama tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertolak belakang dalam praktik kebijakan publik, khususnya pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks BAPPEDA Kota Gorontalo, kedua nilai tersebut justru tampak berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini tercermin dari adanya upaya untuk mengakomodasi kebebasan individu sekaligus menjamin terciptanya keadilan sosial dalam setiap program pembangunan. Dengan demikian, liberalisme dan sosialisme dapat dipahami sebagai dua dimensi nilai moral yang beroperasi secara bersamaan dalam praktik pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya, nilai-nilai liberalisme terlihat melalui penerapan pendekatan partisipatif oleh BAPPEDA Kota Gorontalo. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Selain itu, adanya transparansi dalam proses penyusunan kebijakan serta keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa hak individu untuk berpartisipasi dihargai sebagai bagian penting dalam pembangunan. Pendekatan ini menandakan adanya pergeseran dari pola pembangunan yang bersifat top-down menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, nilai sosialisme juga tercermin secara nyata dalam kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dirancang oleh BAPPEDA Kota Gorontalo menunjukkan perhatian yang besar terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan kelompok rentan lainnya. Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan menjadi indikator bahwa prinsip keadilan sosial menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memainkan peran penting dalam memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Lebih jauh, penggabungan nilai liberalisme dan sosialisme dalam kebijakan BAPPEDA Kota Gorontalo mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan aspek ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih inklusif dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan integrasi kedua nilai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam situasi yang kompleks. Penekanan yang berlebihan pada kebebasan individu berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, sementara dominasi intervensi pemerintah

dapat menghambat kreativitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang fleksibel dan kontekstual agar kedua nilai tersebut dapat berjalan secara selaras.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas kelembagaan, juga menjadi kendala dalam penerapan nilai-nilai tersebut secara optimal. BAPPEDA sebagai lembaga perencana sering menghadapi tuntutan untuk menghasilkan kebijakan yang ideal di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan dalam menetapkan prioritas kebijakan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisme dan sosialisme dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan daerah. Kedua ideologi tersebut tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat dipadukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks BAPPEDA Kota Gorontalo, integrasi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, liberalisme dan sosialisme dapat dipahami sebagai dua prinsip moral yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa liberalisme dan sosialisme merupakan dua ideologi yang memiliki perbedaan mendasar, namun keduanya mengandung nilai moral yang saling melengkapi dalam konteks pembangunan. Liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sedangkan sosialisme menitikberatkan pada keadilan sosial, pemerataan, dan tanggung jawab kolektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keduanya dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan moral yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.

Dalam konteks BAPPEDA Kota Gorontalo, implementasi nilai-nilai liberalisme dan sosialisme terlihat dalam kebijakan perencanaan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara kebebasan dan keadilan. Nilai liberalisme tercermin melalui partisipasi masyarakat, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perencanaan, sementara nilai sosialisme diwujudkan melalui program-program yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak bersifat ideologis secara kaku, melainkan lebih bersifat adaptif dan kontekstual.

Lebih lanjut, integrasi antara kedua ideologi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada kebebasan individu berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, sedangkan pembangunan yang hanya menekankan pemerataan tanpa memperhatikan kebebasan dapat menghambat inovasi dan

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara liberalisme dan sosialisme diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat.

Penelitian ini menegaskan bahwa liberalisme dan sosialisme bukanlah dua ideologi yang harus dipertentangkan secara mutlak, melainkan dapat dipadukan sebagai landasan moral dalam kebijakan publik. Dalam praktiknya di BAPPEDA Kota Gorontalo, integrasi kedua nilai tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2024). *Ekonomi politik kontemporer dan tantangan pembangunan inklusif*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Harahap, M. R. (2025). Liberalisme dalam perspektif pembangunan modern. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 10(2), 115–130.
- Hariyadi, A. (2021). Dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 5(1), 45–60.
- Locke, J. (1689/2020). *Two treatises of government*. Cambridge University Press.
- Maghfiroh, L. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1), 88–102.
- Marx, K. (1867/2019). *Das Kapital: A critique of political economy*. Penguin Classics.
- Mukhtar, D., & Aprison, W. (2025). Paradigma hakikat manusia: Liberalisme dan sosialisme dalam perspektif modern. *Dharmas Education Journal*, 6(1), 25–40.
- Rawls, J. (1971/2020). *A theory of justice (Revised ed.)*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999/2021). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Siswanto, D. (2004). Konvergensi liberalisme dan kolektivisme dalam perspektif filsafat. *Jurnal Filsafat*, 14(2), 123–135.
- Triwikrama, B. (2025). Sosialisme dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 9(1), 55–70.